



Daftar Isi

- Diskusi Data Pertanian Dalam Rapat Pimpinan BPS – Kementerian Pertanian, Halaman 1
- Satu Data Indonesia untuk Data Padi/Beras, Halaman 4
- Kolaborasi Pusdatin & Puslatan: Evaluasi Dampak Program Readsi ke Petani, Halaman 5
- Kementerian Pertanian Ambil Bagian Dalam Merealisasikan Target Kemiskinan Ekstrim Nol Persen di 2024, Halaman 7
- Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Sakernas Agustus 2022, Halaman 9
- Mekanisme Penganggaran dan Clearance TIK Kementan 2023, Halaman 10
- Info Data Pertanian, Halaman 12

Diskusi Data Pertanian Dalam Rapat Pimpinan BPS – Kementerian Pertanian

Pembahasan tentang data tidak akan ada habisnya. Selain sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah, data juga dapat menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan suatu negara. Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo, yang mengatakan bahwa data adalah *new oil*, kekayaan baru yang bahkan lebih berharga dari minyak. Karena demikian berharganya, maka saat ini seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) berupaya menghadirkan data yang akurat dan *up to date*.

Dalam upaya menghasilkan data yang akurat dan *up to date* tersebut, pada tahun 2023 BPS akan melaksanakan Sensus Pertanian (ST2023) yang akan menjadi tonggak perbaikan data pertanian. ST2023 menjangkau semua usaha pertanian (termasuk usaha jasa pertanian) di seluruh wilayah geografis atau territorial Indonesia. Cakupan unit usaha meliputi usaha pertanian perorangan, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya. Dalam ST2023 juga telah diakomodir pemanfaatan data spasial untuk mendapatkan titik koordinat dari pelaku usaha pertanian.

Dalam rangkaian persiapan ST2023, pada tanggal 6 Januari 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mengundang Kementerian Pertanian menghadiri rapat pimpinan (Rapim) di Grand Savero Hotel Bogor. Rapim bertujuan untuk mendiskusikan isu strategis ST2023 dan sekaligus membahas kolaborasi BPS-Kementan dalam pengumpulan dan pemanfaatan data sektor pertanian. Diskusi dipimpin langsung oleh Kepala BPS Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si. didampingi Sekretaris Utama BPS Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah, S.Si, M.Si, beserta seluruh Direktur di Kedeputan Statistik Produksi BPS.

Sementara dari Kementerian Pertanian, hadir Sekretaris Jenderal Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. mewakili Bapak Menteri Pertanian, didampingi Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Roby Darmawan, M.Eng., Plt. Sekretaris Ditjen Hortikultura Dr. Inti Pertiwi, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ir. Hendratmojo Bagus Hudoro, M.Sc dan Koordinator Padi Irigasi dan Rawa Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan Dr. Rachmat, S.Si., M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sekretaris Jenderal menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi BPS yang telah menghasilkan data secara obyektif. Kementan selalu mengacu pada data yang dirilis oleh BPS. Selama ini beberapa data telah diterima secara rutin dari BPS dan telah dimanfaatkan untuk mengukur capaian kinerja sektor pertanian, antara lain data komoditas padi hasil KSA, hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta data indikator makro sektor pertanian seperti PDB, konsumsi, ekspor impor, inflasi, NTP/NTUP, harga, tenaga kerja, kemiskinan, dll.

Beberapa data pendukung perlu dilakukan pemutakhiran, misalnya data konsumsi beras yang saat ini masih menggunakan hasil survei BAPOKBPS tahun 2017. Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi maupun pengembangan terhadap metodologi pengumpulan data yang selama ini digunakan. Misalnya, evaluasi terhadap metode pengukuran produktivitas padi, atau pengembangan cakupan komoditas pertanian yang dikumpulkan datanya maupun pemanfaatan teknologi *remote sensing*. Teknologi *remote sensing* dapat memperkuat pendataan administrasi yang telah dilakukan selama ini karena data yang dihasilkan adalah data terkini, dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia, hemat biaya dan waktu.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Mas'ud, SE, M.Si
Andry Polos, S.Kom, M.Si
Roydatul Zikria, S.Si., M.S.E
Hani Hanifah, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE
Iswadi

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE
Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Cahyani Wartianingsih, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Hotlanis Mangatur S, S.Kom
Priatna Sari
Murdino
Marwati



Alamat Redaksi

PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 78842029
e-mail : newsletter@pertanian.go.id



Kepala BPS meminta jajarannya untuk melakukan kalibrasi terhadap metodologi pengumpulan data dan sekaligus mempercepat agenda sinkronisasi data bekerjasama dengan Kementan agar dapat segera diketahui kebutuhan data. Kepala BPS juga menyarankan agar Kementan mencantumkan kebutuhan data tersebut dalam RPJMN atau Rencana Strategis (Renstra) Kementan sehingga data yang dibutuhkan menjadi data yang diprioritaskan untuk dikumpulkan.

Terkait hilirisasi, Kementan mengusulkan kepada BPS untuk menyusun kode HS dan KBLI yang lebih rinci untuk komoditas pertanian agar dapat dipisahkan dengan jelas kinerja sesuai kewenangan masing-masing K/L. BPS menginformasikan bahwa tahun 2023 akan dilakukan perubahan tahun dasar untuk penghitungan PDB, oleh karena itu BPS memerlukan dukungan dari masing-masing K/L sehingga data PDB dapat mencerminkan kinerja K/L.

Kementan sepakat penggunaan satu data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, dengan mengacu pada data dari BPS. Kementan mengusulkan satu aplikasi umum yang masuk dalam SPBE. Namun untuk data-data yang tidak dapat dijangkau oleh BPS agar dapat diselenggarakan oleh masing-masing K/L sebagai data sektoral dengan tetap melibatkan BPS, khususnya dalam hal standarisasi data. Untuk keperluan statistik sektoral, BPS akan membentuk gugus tugas yang akan membantu mengawal pelaksanaan statistik sektoral. BPS juga berharap data-data hasil kegiatan statistik sektoral dapat dibagipakaikan. BPS selaku

Pembina Data Statistik siap berkolaborasi untuk menghasilkan data yang akurat. Untuk keperluan tersebut akan diusulkan Perpres yang mengatur kerjasama pusat dan daerah dalam pengumpulan data.

ST2023 dapat menjadi tolok ukur (*branchmark*) untuk perbaikan data pertanian Indonesia. Kementan akan mendukung penuh pelaksanaan ST2023. Dukungan Kementan telah diberikan saat persiapan pelaksanaan Gladi Kotor dan Gladi Bersih ST2023 melalui dukungan data kelompok tani dan petani hasil SIMLUHTAN dan data perusahaan dari PVTTP. Kedua data tersebut digunakan BPS sebagai kerangka sampel dalam Gladi Kotor maupun Gladi Bersih tersebut. Tentunya Kementan berharap dapat memperoleh dan memanfaatkan data hasil ST2023 untuk intervensi kebijakan sektor pertanian. Namun demikian perlu dipikirkan bersama pemutakhiran dari ST2023 pada tahun-tahun berikutnya agar data hasil ST2023 dapat menjadi data yang dinamis. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dukungan dari Pemerintah Daerah.

BPS berharap agar Kementan dapat mengkomunikasikan pelaksanaan ST2023 yang jatuh pada bulan Mei-Juni 2023 dengan stakeholder di pusat dan daerah, agar petugas ST2023 dapat diterima dengan baik oleh petani dan pelaku usaha pertanian, sehingga ST2023 dapat berjalan sukses dan data yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk kemajuan pertanian Indonesia.

Penulis : Dr. Anna Astrid Susanti

Satu Data Indonesia untuk Data Padi/Beras

Keputusan Pemerintah untuk memperbaiki data pangan patut didukung dan diapresiasi, karena dengan data yang baik dan tepat maka pengambilan keputusan dan kebijakan akan lebih akurat terutama data produksi padi yang berkaitan erat dengan keamanan pangan strategis nasional. Dengan terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kebijakan tata kelola data pemerintah ditujukan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi baik pusat maupun daerah. Demi tercapainya Satu Data Indonesia (SDI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan rapat pembahasan Satu Data Indonesia untuk data padi/beras di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 18 Januari 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Bapak Suharso Monoarfa dan dihadiri oleh Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas, Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Direktur Pangan dan Pertanian, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP), Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dan Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS.

Langkah perbaikan dalam perhitungan luas panen, produksi dan produktivitas padi terus dilakukan agar didapatkan data produksi padi yang semakin presisi. Saat ini perhitungan data produksi padi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode pengukuran Kerangka Sampel Area (KSA) yang dimulai sejak tahun 2018. Penggunaan metode KSA menggantikan metode sebelumnya yang menggunakan pengukuran mata (*eye estimate*) yang bersifat subjektif untuk mengukur luas panen. Tujuan penggunaan KSA adalah untuk memperoleh data luas panen padi yang lebih objektif, akurat, cepat, dan modern.



Kerangka Sampel Area adalah survei berbasis area yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sampel segmen dan bertujuan untuk mengestimasi luasan dengan ekstrapolasi dari sampel ke populasi dalam periode yang relative pendek (*rapid estimate*). Di Indonesia, potensi pertanaman dan luas panen dengan metode KSA dikembangkan oleh BPPT sejak tahun 1998 dan digunakan untuk menghitung estimasi produksi padi terkini serta potensi 3 bulan ke depan dengan menggunakan statistik spasial. Menurut BPS, sampai saat ini metode KSA yang telah dikembangkan bersama KemenATR/BPN masih dianggap sebagai metode terbaik dalam perhitungan data produksi padi.

Dalam hal penguatan data luas panen, produksi dan produktivitas yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, maka Badan Litbang Pertanian pada tahun 2020 mengembangkan suatu sistem informasi dengan model standing crop yang berbasis penginderaan jauh. Sistem Informasi *Standing Crop* (SISCrop) dikembangkan oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan LAPAN dan Kementerian/Lembaga lain serta Perguruan Tinggi. SISCrop menggunakan citra satelit Sentinel 1 sebagai sumber data untuk menghindari kesalahan hitung luas dan lokasi di lapangan. Dengan begitu, data yang disajikan dapat memudahkan petugas lapang untuk memantau kondisi wilayah pertanian yang cukup sulit dijangkau.

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, Bapak Fadry Djufri, menjelaskan bahwa aplikasi SISCrop berfungsi untuk memonitor lahan pertanian kondisi tanaman padi secara lebih akurat. Lebih lanjut menurut Kepala BSIP, keunggulan SISCrop dapat memonitor fase pertumbuhan padi, luas tanam, luas panen, produktivitas, dan indeks pertanaman

secara *real time*. Saat ini SISCrop sudah memasuki versi 2.0 dimana telah dilakukan pembaharuan informasi data standing crop untuk seluruh wilayah Indonesia. SISCrop 2.0 merupakan teknologi data satelit standing crop yang terbaru dari SISCrop 1.0 tahun 2020.

Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Ibu Husnain menambahkan bahwa dengan teknologi ini dapat diperoleh data produktivitas, selain standing crop yang ada. Lebih lanjut Ibu Husnain menambahkan bahwa teknologi ini merupakan terobosan berbasis satelit yang menghasilkan Pertanian Presisi. Informasi dalam SISCrop 2.0 sangat membantu dalam menetapkan luas tanam, luas panen, produktivitas, dan estimasi produksi padi nasional.

Pengembangan SISCrop 2.0 oleh Kementan merupakan bentuk dukungan terhadap BPS dalam penyempurnaan metode perhitungan data luas panen KSA BPS, dalam kerangka

kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam pemanfaatan data satelit untuk pertanian, Kementerian Pertanian menyatakan siap berkolaborasi dengan tim BPS untuk mengkaji lebih lanjut pemanfaatan satelit dalam penyempurnaan metode KSA untuk perhitungan luas panen dan produktivitas padi. Metode perhitungan produktivitas padi SISCrop dan KSA berbeda. Pada SISCrop pengukuran produktivitas dilakukan menggunakan radar satelit berdasarkan pada kekasaran dari obyek yang ditangkap. Pixel warna yang tertangkap dicatat oleh radar dan diberi nomor digital yang kemudian diterjemahkan menjadi perhitungan produktivitas dengan menggunakan model yang ada. Di sisi lain, perhitungan produktivitas pada KSA menggunakan metode perhitungan ubinan ke lapangan pada lokasi yang sudah ditentukan.

Penulis: M. Ade Supriyatna, SP, MM

Kolaborasi Pusdatin & Puslatan: Evaluasi Dampak Program READSI ke Petani

Program READSI merupakan program pemberdayaan petani baik secara individu maupun kolektif (kelompok tani) melalui peningkatan keterampilan dan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2019 dengan sasaran rumah tangga pertanian pedesaan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan dukungan pembiayaan dari *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*. Program READSI sangat beragam berupa pelatihan mulai dari budidaya sampai pengolahan dan pemasaran (Sekolah Lapang, Demplot, Temu Lapang Petani, *Farmer Review Day*, Mekanisasi Dasar, Pelatihan *Social Marketing Activities*, Bimbingan Lanjutan, Sosialisasi Peningkatan Kesadaran dan Perbaikan Gizi, Agronomi Kakao, Agribisnis Kakao/*Cocoa Doctor*), subsidi (saprodi, alsin), pendampingan, pembangunan infrastruktur



desa, dan peningkatan peran wanita melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan memanfaatkan pekarangan dan gizi keluarga.

Pada tahun 2022, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Pertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menyelenggarakan *Annual Outcome Survey - Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative 2022 (AOS READSI 2022)*. Kegiatan ini merupakan survei tahunan yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi perubahan sosial ekonomi yang mencakup peningkatan pendapatan, produksi, dan adopsi teknologi diantara petani penerima manfaat Program READSI. AOS READSI 2022 juga bertujuan untuk mengukur efektifitas intervensi, tingkat

partisipasi petani dalam kegiatan pelatihan serta efektifitas hasil pelatihan yang diberikan kepada petani penerima manfaat Program READSI.

Peran Pusdatin pada AOS READSI 2022 meliputi penyusunan kuesioner survei, melakukan pemilihan petani sampel, membuat aplikasi input data sederhana, menyusun pedoman tata cara pengisian kuesioner, mensosialisasikan kuesioner dan tata cara pengisiannya ke petugas enumerator dan supervisor, melakukan pilot survei dan supervisi (bersama Tim READSI), melakukan pengolahan dan analisis data hasil survei, menyampaikan hasil survei serta menyusun laporan hasil survei. Survei AOS READSI dilaksanakan pada Bulan November 2022 di 6 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur yang tersebar di 18 kabupaten dan 72 desa dengan melibatkan 72 enumerator dan 785 sampel (dari total populasi 55.804 petani di 6 provinsi, 18 kabupaten/kota, 120 kecamatan dan 342 desa) yang berasal dari 8 kelompok komoditas yaitu hortikultura sayuran, hortikultura buah, padi, jagung, ternak, kakao, tanaman pekarangan, dan tanaman perkebunan lainnya. Pada saat pelaksanaan survei juga dilakukan kegiatan supervisi oleh tim gabungan dari Pusdatin dan READSI pada tanggal 7-26 November 2022 di 18 kabupaten/kota di 6 provinsi.

Hasil AOS READSI 2022 telah disampaikan oleh Bapak Roby Darmawan, M.Eng selaku Kapusdatin pada workshop yang diselenggarakan secara hybrid tanggal 22 Desember 2022 di Bogor. Berdasarkan hasil survei, partisipasi dalam pelatihan diikuti oleh sebanyak 83,58% petani dan 16,42% tidak mengikuti pelatihan. Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan petani sangat tinggi mencapai rata-rata 98,23%. Dari sisi efektifitas pelatihan, pemahaman materi pelatihan oleh petani sangat baik karena 93,82% petani memahami materi pelatihan yang disampaikan, sisanya 6,09% merasa kurang paham dan hanya 0,09% yang tidak paham. Untuk implementasi pelatihan, sebanyak 89,10% petani telah menerapkan pengetahuan yang diberikan melalui kegiatan pelatihan dan sekitar 73,59% petani telah mengajarkan ilmu materi pelatihan

yang diperoleh kepada petani lain yang tidak mendapatkan pelatihan. Dampak pelatihan terhadap peningkatan produksi, kualitas produk, kemampuan pasca panen dan pendapatan juga dinikmati oleh sebagian besar petani secara rata-rata yakni 70,26% dari total petani sampel. Kepuasan petani terhadap pelaksanaan pelatihan mencapai 97,69% yang terdiri dari puas sebesar 72,16% dan 25,53% sangat puas.

Intervensi yang diberikan dalam Program READSI berupa bantuan saprodi (bibit unggul, pupuk, alsin), pembangunan infrastruktur desa, pendampingan teknis budidaya dan pemberdayaan usaha petani. Pada saat ini, terdapat 80,12% petani yang menggunakan bibit unggul, lebih banyak dibandingkan sebelum ada Program READSI. Infrastruktur desa yang dibangun oleh READSI berupa lantai jemur, jalan usaha tani, saluran irigasi/drainase dan pos penyuluhan desa. Mayoritas atau 96,59% petani menyatakan telah menerima pendampingan program dan 93,94% diantaranya merasa puas dan sangat puas dengan program tersebut.

Perubahan sosial ekonomi dari dampak Program READSI terjadi pada perbaikan teknis budidaya petani saat ini dibandingkan sebelum mengikuti program. Petani juga telah memahami manfaat dari penggunaan bibit unggul, pemupukan dan alsin namun sebagian besar petani masih mengandalkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, terjadi peningkatan pendapatan dari komoditas yang diusahakan dibanding sebelum ada Program READSI. Namun hanya sebagian kecil petani yang telah melakukan kegiatan pengolahan hasil pertanian sehingga belum terlihat adanya upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian, hal ini dikarenakan petani tidak memiliki alat pengolahan dan kecukupan modal. Untuk pemasaran hasil pertanian, sebagian besar petani masih menjual hasil panennya ke pedagang pengumpul karena lebih mudah dan langsung dibayar.

Secara umum, program READSI telah memberikan manfaat kepada petani namun hanya pada aspek teknis budidaya, sedangkan pada aspek pengolahan hasil produk, manfaat program belum terlihat secara nyata. Bantuan saprodi khususnya bibit unggul dari pemerintah masih menjadi

andalan petani untuk meningkatkan hasil budidayanya. Selain itu petani juga belum terlihat memiliki kapasitas untuk memasarkan hasil panennya ke akses yang lebih luas yakni di luar desa tempat tinggal atau secara online. Rekomendasi yang diberikan oleh Pusdatin dari hasil AOS READSI 2022 berupa melakukan *update database* petani penerima Program READSI secara berkala, hal ini karena pada saat survei terdapat beberapa petani sampel yang tidak dapat ditemui baik karena meninggal dunia atau pindah tempat tinggal, selain itu terdapat juga alih komoditas yang dilakukan oleh petani saat ini sehingga tidak sama dengan komoditas ketika menerima Program READSI. Rekomendasi lainnya perlu adanya bantuan mesin pengolahan dan pendampingan untuk

kegiatan pengolahan hasil bagi kelompok petani untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan bagi petani. Dalam hal pemasaran hasil pertanian, perlu adanya perhatian lebih untuk peningkatan kapasitas petani agar dapat melakukan pemasaran secara lebih luas seperti ke luar desa tempat tinggal atau melalui *marketplace*. Khusus untuk petani kakao yang dilatih oleh PT. MARS melalui pelatihan agronomi dan *cocoa doctor*, dirasa perlu untuk dilakukan pendampingan dalam pengurusan dokumen legalitas usaha. Untuk survei AOS selanjutnya, agar dapat membandingkan dampak dari Program READSI antara petani penerima program dan petani non-penerima program.

Penulis: Yuliatwati Rohmah

Kementerian Pertanian Ambil Bagian Dalam Merealisasikan Target Kemiskinan Ekstrim Nol Persen di 2024

Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim setara dengan USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Pada kondisi ini masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrim tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya, seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal.



Gambar 2. Rapat Pemutakhiran Data Pemberdayaan dan Pembuatan Dashboard Monitoring Kemiskinan

jumlah penduduk miskin secara umum Indonesia adalah 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa, dimana sebesar 2,04 persen atau sekitar 5,59 juta jiwa berada pada kategori miskin ekstrim.

BPS menjelaskan bahwa sebaran penduduk miskin sebagian besar terdapat di daerah perdesaan yaitu sebanyak 14,34 juta jiwa atau sekitar 12,29 persen dan di perkotaan sebanyak 11,82 juta jiwa atau 7,50 persen. Penduduk miskin tersebar di semua pulau di Indonesia dengan konsentrasi terbesar terdapat di Pulau Jawa yang juga merupakan pulau terpadat di Indonesia.

Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Nol Persen di 2024

Dalam roadmap strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, di 2021 pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrim



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan berdasarkan Susenas Maret 2022,



Gambar 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2022

di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, dimana setiap provinsi masing-masing lima kabupaten/kota. Kemudian di 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 3-3,5 persen. Berlanjut di 2023-2024, diperluas menjadi 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstrim di 2,3-3 persen. Diharapkan di 2024 kemiskinan ekstrim sudah tercapai target nol persen. Pada masing-masing periode tersebut diimplementasikan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun strategi penghapusan kemiskinan ekstrim yang dicanangkan pemerintah secara garis besar antara lain: mengurangi beban pengeluaran dengan pemberian bansos/BPNT, KIP, KIS, PKH; meningkatkan pendapatan dengan pemberian KUR, prokus dan program pemberdayaan lainnya; mengurangi kantong kemiskinan dengan pembangunan sanitasi, air bersih, dan BSPS. Untuk melaksanakan strategi tersebut Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Anggota TNP2K sendiri terdiri dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Kementerian dan Lembaga yang ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim antara lain : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pertanian serta Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam meneruskan program pengentasan kemiskinan ekstrim, Kementerian dan

Lembaga masih harus menyelesaikan tantangan pencapaian target kemiskinan, seperti penyempurnaan basis data penetapan sasaran, menghilangkan data *exclusion error* maupun *inclusion error*. Untuk itu, pada Jum'at, 8 April 2022 Kementerian dan Lembaga tersebut kembali berkoordinasi di Hotel Shangrilla, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, masing-masing kementerian dan lembaga menyampaikan program yang sudah dilaksanakan dan pemutakhiran data penerima bantuan, baik penerima bantuan individu maupun kelompok.

Pada kesempatan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan program pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan dengan strategi peningkatkan produktivitas dan pemberdayaan kelompok miskin ekstrim. Program unggulan yang sudah bergulir antara lain : program padat karya, bantuan untuk individu/kelompok, pelatihan kerja, dan pendampingan kewirausahaan. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan program lahan garam yang difasilitasi, sarana niaga garam rakyat, bantuan ekonomi produktif pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar, mendirikan Unit Pengolahan Ikan bernilai tambah pada Kawasan Terpadu, kampung perikanan budidaya, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan Kementerian Tenaga Kerja yang memaparkan beberapa program yang akan dilanjutkan antara lain: pelatihan kerja berbasis kompetensi, wirausaha tenaga kerja mandiri, padat karya infrastruktur dan tematik dengan bantuan Rp.100 juta per paket. Berikutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan beberapa program, antara lain: Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah Rumah, Cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan, perbaikan sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim, sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Paparan diakhiri oleh Kementerian Pertanian dengan merinci beberapa program yang akan terus dilanjutkan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Program diambil dari

kegiatan yang ada di seluruh eselon 1 di Kementerian Pertanian, antara lain: Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Gerakan Pengendalian DPI, Bimtek sosialisasi tanaman pangan, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Sarana Pengolahan Susu, Pekarangan Pangan lestari (P2L), Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Nursery, pengelolaan irigasi secara integratif dan partisipatif (BPSDMP), *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative* (READ-SI), serta pemberian bantuan berupa pupuk dan benih bersubsidi serta alat dan mesin pertanian berbasis data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dimana penerima bantuan disyaratkan harus menjadi anggota kelompok tani dan memiliki luas usaha pertanian maksimum 2 hektar.

Tahap selanjutnya Kementerian Pertanian memperbaiki basis data petani

Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Sakernas Agustus 2022

Dalam perencanaan pembangunan pertanian, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting, karena tanpa data tersebut tidaklah mungkin program pembangunan pertanian dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan Sumber Daya Manusia Kelompok Umur atau ketenagakerjaan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Pengumpulan data ketenagakerjaan sektor pertanian didasarkan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang merupakan survey khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara umum. Sakernas sendiri dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada Februari dan Agustus. Sakernas Februari dan Agustus 2022 dilaksanakan di seluruh provinsi di wilayah Republik Indonesia. Pada Agustus 2022, besarnya sampel Sakernas sebanyak 30.000 BS atau sekitar 300.000 rumah tangga (yang terdiri dari 7.500 BS sampel

penerima bantuan. Data tersebut untuk dipadupadankan dengan semua data per jenis bantuan. Hal tersebut dimaksudkan agar bantuan yang diterima tepat sasaran. Selain data individu petani, TPN2k juga mengumpulkan data lembaga-lembaga ekonomi masyarakat seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau koperasi yang dapat diberikan program pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dan terus dilaksanakan sesuai dengan peta jalan (*road map*) dan rencana-rencana strategis pengentasan kemiskinan ekstrim memberikan rasa optimisme target kemiskinan ekstrim nol persen tercapai di tahun 2024.

Penulis: Uliyah



Sakernas Semester 2 dan 22.500 BS sampel Sakernas Tahunan). Sakernas Agustus 2022 dikumpulkan untuk memperoleh estimasi data ketenagakerjaan yang representatif hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, Sakernas Agustus 2022 juga mempunyai tujuan khusus untuk mengumpulkan informasi terkait dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Tenaga kerja sendiri adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun dan lebih.

Dari hasil Sakernas Agustus 2022, BPS telah merilis jumlah penduduk usai kerja yang telah bekerja sebesar 135,29 juta jiwa. Untuk tenaga kerja pertanian (dalam arti sempit) sendiri, jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian pada Agustus 2022 berjumlah 35,91 juta orang, yang terdiri dari jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 23,06 juta jiwa

atau 64,22% dan tenaga kerja perempuan sebanyak 12,85 juta jiwa atau 35,78%. Data tersebut meningkat 1,80 juta jiwa (5,27%) yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan Sakernas Agustus 2021 yang berjumlah 34,11 juta orang. Tenaga kerja pertanian (dalam arti sempit) tersebut tersebar ke dalam empat subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Untuk penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan, pada Sakernas Agustus 2022 mencapai 14,97 juta jiwa (41,69%) dari seluruh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Subsektor ini merupakan subsektor yang paling tinggi menyerap tenaga kerja dibanding subsektor lainnya di lingkup pertanian. Pada sektor tanaman pangan sendiri, menyerap tenaga kerja laki-laki sebanyak 9,36 juta jiwa (62,53%) dan tenaga kerja perempuan sebanyak 5,61 juta jiwa (37,47%). Kemudian jumlah penduduk yang bekerja di subsektor hortikultura pada Sakernas Agustus 2022 sebesar 2,37 juta orang atau 10,77%. Pada sektor hortikultura telah menyerap tenaga kerja laki-laki sebanyak 2,37 juta jiwa atau 61,32%, dan tenaga kerja perempuan sebanyak 1,49 juta jiwa atau 38,68%.

Lalu Penduduk yang bekerja di subsektor perkebunan pada Sakernas Agustus 2022

mencapai sebesar 12,59 juta jiwa (35,08%) dari total tenaga kerja di sektor pertanian. Pada sektor perkebunan, telah menyerap tenaga kerja laki-laki sebanyak 8,67 juta jiwa (68,88%) dan tenaga kerja perempuan sebanyak 3,91 juta jiwa (31,12%). Dan untuk penduduk yang bekerja di subsektor peternakan pada Sakernas Agustus 2022 mencapai 4,48 juta jiwa atau 12,49% dari total tenaga kerja sektor pertanian. Sektor peternakan ini menyerap tenaga kerja laki-laki sebanyak 2,65 juta jiwa atau 59,28%, dan tenaga kerja perempuan sebanyak 1,82 juta jiwa atau 40,72%.

Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tumbuh positif terhadap guncangan apapun, pertumbuhan positif tersebut dikategorikan sebagai penyelamat ekonomi nasional selain sektor-sektor strategis seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor industri pengolaha. Kondisi ini rupanya dianggap menjadi peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan, ini menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian dinilai tangguh terhadap guncangan krisis, serta menjadi tumpuan dan harapan untuk ekonomi kita tetap bisa bangkit pada saat ini.

Penulis: Heri Dwi Martono

Mekanisme Penganggaran dan Clearance TIK Kementan 2023

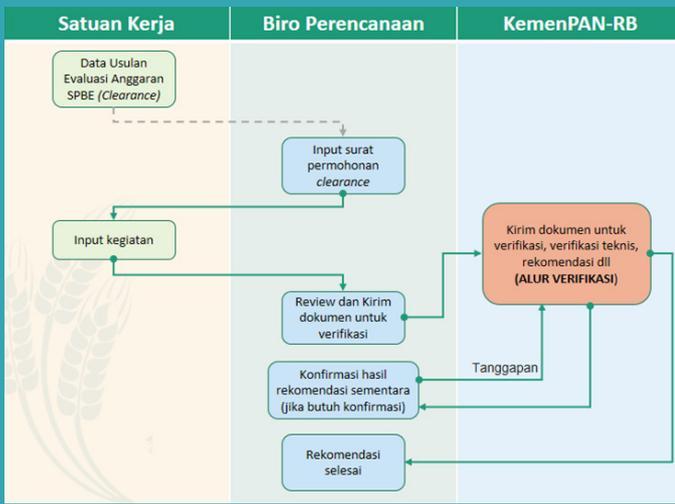
Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 Dalam Kerangka Implementasi SPBE diinformasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Kominfo dan Menteri PAN RB (No 17 Tahun 2022 dan No.4 Tahun 2022).

Tata kelola evaluasi SPBE memberikan informasi bahwa kegiatan yang wajib di clearance yaitu: Belanja TIK yang membutuhkan rekomendasi (clearance) adalah Pembelian/ Pengadaan/ pengembangan sistem TIK; Berkenaan dengan waktu proses evaluasi anggaran (clearance) TA 2023 dalam kerangka

implementasi SPBE yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023, untuk itu agar masing-masing unit kerja mengajukan usulan clearance tahun 2023; Bahwa clearance merupakan Hal-Hal Khusus dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2023 dan tercantum dalam lampiran Surat Menteri Keuangan pada Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023.

No.	AKTIVITAS/KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT
		Setoran Kerja	Unit Kerja	Biro/Perencanaan	Tim Tabung SPBE			
1	Satuan Kerja mempersiapkan Surat Pengajuan Clearance Kegiatan TIK ke Unit Kerja (Unit) untuk ditinjau dan ditandatangani Kepala/ Wakil Kepala Anggaran SPBE pada url https://pjsipbe.layanan.go.id					Surat Pengajuan Clearance Kegiatan TIK yang terdiri dari: 1. Daftar Dokumen persyaratan yang akan disubmisi (Kerangka usulan kerja dan Cost Benefit Analysis) 2. Label nilai yang perlu diisi untuk melampirkan dan Checklist untuk kegiatan sesuai dengan antarbater SPBE (Kerubahan) Kementerian	1 hari	Surat Pengajuan Clearance Kegiatan TIK kepada Biro Perencanaan dan Admisi Unit Kerja (Estasi I)
2	Unit Kerja Estasi I memeriksa kelengkapan dokumen dan anggaran yang diperlukan untuk mengajukan Surat Permohonan Clearance kepada Biro Perencanaan					Surat Permohonan Clearance Kegiatan TIK dan lampiran dokumen yang telah ditinjau pada aplikasi SPBE	1 hari	Surat pengajuan Clearance kegiatan TIK kepada Biro Perencanaan dan Admisi Unit Kerja (Estasi I)
3	Biro Perencanaan memeriksa hasil pengisian usulan Clearance pada aplikasi Sistem SPBE (Estimasi) dan memeriksa Surat Pengajuan Clearance Kegiatan TIK Satuan Kerja ke Tim SPBE Kementerian untuk di nilai dan mendapatkan rekomendasi label					Surat pengajuan Clearance kegiatan TIK Admisi Unit Kerja Estasi I	2 hari	Surat permohonan pembaharuan/ nilai kepada Tim SPBE Kementerian (Keg. Regula. Pusat Data dan Sistem Informasi, Perencanaan Kementerian Pertanian)
4	Tim SPBE Kementerian melakukan nilai holistik/kegiatan belanjanya serta memusatkan hasil laporan melalui Aplikasi SPBE Kementerian Pertanian dan pengumpulan hasilnya kepada Biro Perencanaan					1. Surat Pengajuan Clearance Kegiatan TIK; 2. Estimasi dengan Struktur SPBE Kementerian; 3. Konsultasi dengan Peta Rencana SPBE Kementerian; 4. Konsultasi/Kolaborasi Anggaran Kegiatan TIK	2 hari	Surat hasil revaluasi/baharuan Tim SPBE Kementerian Pertanian
5	Biro Perencanaan mengupload permohonan Clearance Kegiatan TIK kepada Kementerian dan Kementerian ditinjau dengan dokumen hasil nilai					Surat Pengajuan Clearance Kegiatan TIK kepada Kementerian RB disertai hasil revaluasi/baharuan melalui aplikasi Sistem SPBE pada url https://pjsipbe.layanan.go.id	1 hari	Pengajuan Clearance Kegiatan TIK melalui aplikasi Evaluasi SPBE pada url https://pjsipbe.layanan.go.id
6	Kementerian + Kementerian menerima Surat Pengajuan Clearance Kegiatan TIK Kementerian Pertanian					Usulan Evaluasi SPBE Kementerian Pertanian	14 hari	Surat persetujuan Clearance

Gambar 1. Mekanisame usulan clearance tahun 2022 Kementan



Gambar 2. Mekanisme usulan clearance tahun 2023 Kementan

Adapun Surat Usulan Clearance itu berisi : Nomor Surat, Tahun Anggaran, Perihal Surat, Tanggal Surat, Jabatan Pengirim, Jumlah Kegiatan, Nama Penanggung Jawab, No. kontak penanggung jawab permohonan serta Lampiran scan surat permohonan clearance dan Lampiran peta rencana kegiatan,



Gambar 3. Alur verifikasi evaluasi anggaran SPBE

Dalam mekanisme mendapatkan user id, saat ini pengusulan user/akun pada aplikasi ega 2023 tidak lagi dilakukan oleh Biro Perencanaan, akan tetapi langsung diusulkan kepala Kementerian PAN-RB melalui alamat asdep2balaks@menpan.go.id

Levelisasi akun yang diusulkan berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana user/akun dapat diusulkan sampai dengan unit kerja Eselon II, sedangkan untuk saat ini pengusulan akun hanya pada 1 level, untuk itu agar masing-masing unit kerja mengusulkan user/akun Eselon I sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 dari Bagian Data dan 1 dari Bagian Perencanaan

Adapun mekanisme pengusulan kegiatan Pada saat pengusulan kegiatan Unit kerja Eselon I diharapkan sudah melakukan

koordinasi terkait penyusunan kegiatan dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku Koordinator SPBE di lingkup Kementerian Pertanian dan usulan Clearance yang diusulkan harus selaras dengan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pertanian; Pada saat pengusulan agar seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipersiapkan meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) Clearance , Peta Rencana, Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian dan Cost of Benefit Analysis (CBA);

“Kementerian Pertanian sudah memiliki data yang sudah disetujui pada clearance 2022 adalah Ditjen Hortikultura sebanyak 12 clearance (aplikasi dan perangkat); Ditjen Peternakan sebanyak 4 clearance (aplikasi); PPVTPP sebanyak 1 clearance (aplikasi); Barantan : 1 clearance (infrastruktur)” Ujar Perwakilan dari Biro Perencanaan, Sekretarian Jenderal Kementan

Clearance dapat dilakukan satu tahun sebelum, dapat juga mengajukan pada tahun berjalan. Ada 5 (lima) yang harus difokuskan dalam pelaksanaan clearance TIK yaitu Ketersediaan anggaran dan keseimbangan pendanaan kegiatan, Urgensi, Efisiensi dan efektivitas kegiatan yang diusulkan, Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result based), Kesesuaian informasi kinerja dan arsitektur perencanaan anggaran kegiatan (Selaras dengan Sasaran Strategis Renstra Kemententerian Pertanian), Hasil Review / Rekomendasi dari TIM Teknis SPBE Kementerian Pertanian.

Penulis: Hani HR





PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI DESEMBER 2022

Nilai Tukar Petani (NTP)

109,00

Naik 1,11% ▲

Indeks Harga yang Diterima Petani (it)

125,23

Naik 1,83% ▲

Indeks Harga yang Dibayar Petani (ib)

114,89

Naik 0,72% ▲

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

108,96

Naik 1,59% ▲

Perkembangan NTP & NTUP, Januari - Desember 2022



PERKEMBANGAN INFLASI DESEMBER 2022

INFLASI UMUM
0,66%

INFLASI TAHUN KALENDER (UMUM)
5,51%

INFLASI TAHUN KE TAHUN (UMUM)
5,51%

INFLASI TAHUN KE TAHUN (MAKANAN)
5,67%



PERKEMBANGAN EKSPOR PERTANIAN (SEGAR, OLAHAN)

616,35 T

658,18 T



JAN - DES 2021



JAN - DES 2022

EKSPOR

6,79%

Bila dibandingkan dengan Jan - Des 2021



*Data tahun 2021 merupakan angka revisi dan menggunakan cakupan kode HS sesuai Juknis HS 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pengelompokan segar dan olahan oleh Pusdatin



Sumber : Badan Pusat Statistik